



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

LAPORAN DELEGASI DPR RI

“Parliamentary Forum at the High-Level Political Forum on Sustainable Development”

22 Juli 2025 | New York - Amerika Serikat



THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025



LAPORAN KUNJUNGAN

Parliamentary Forum at the High-Level Political Forum on Sustainable Development

“Gender equality and health: fast forwarding progress”

New York – Amerika Serikat, 22 Juli 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Forum Parlemen di Forum Politik Tingkat Tinggi PBB atau *High Level Political Forum* (HLPF) merupakan forum yang dirancang untuk melibatkan anggota parlemen dalam menilai kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat global. Forum Parlemen dalam (HLPF) ini memberikan kesempatan besar bagi pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen atas program-program pemerintah serta pertukaran praktik legislatif terbaik tentang pembangunan berkelanjutan dari parlemen di seluruh dunia.

Forum Parlemen dalam (HLPF) 2025 ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Forum tahun ini berfokus pada dua (TPB) yang sedang ditinjau di (HLPF), yaitu (TPB) 3, tentang kesehatan dan kesejahteraan manusia, dan (TPB) 5, tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Dalam dua sesi pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil parlemen untuk memajukan tujuan-tujuan ini dan membantu menata ulang seluruh kerangka (TPB).

DPR RI memiliki peran sentral dalam mendorong serta memastikan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat nasional. Peran tersebut dijalankan melalui tiga fungsi konstitusional yang melekat, yakni fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan. Melalui ketiga fungsi ini, DPR RI tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak agar kebijakan nasional senantiasa sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, peran parlemen juga sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi TPB/SDGs tetap berorientasi pada masyarakat (people-centered). Sebagai lembaga representatif, DPR RI berfungsi untuk memperjuangkan pembangunan yang berpusat pada kepentingan rakyat, sekaligus memastikan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mencerminkan serta merespons kebutuhan konstituen. Dengan demikian, parlemen berperan aktif dalam mengawal agar agenda pembangunan berkelanjutan berjalan inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan UU MD3, DPR RI memiliki mandat untuk ikut berperan serta dalam upaya diplomasi Indonesia, termasuk dengan mendukung upaya pengarusutamaan TBP dalam penyusunan regulasi dan undang-undang, serta pengawasan dalam pelaksanaan TBP. DPR RI telah bekerja secara proaktif memantau implementasi SDG di dalam negeri dan bekerja lintas negara dengan parlemen lain untuk berbagi praktik terbaik terkait percepatan pencapaian TBP, salah satunya melalui pertemuan HLPF.

B. Tujuan

1. Memperoleh gambaran strategis bagaimana mengukur hambatan dan peluang utama bagi parlemen untuk melembagakan dan mengarusutamakan TBP dengan lebih baik dalam proses legislasi.

2. Mendorong saling berbagi praktik baik untuk memperdalam pengawasan parlemen terhadap tindakan pemerintah dalam pengimplementasian TBP.

C. Dasar Hukum

Partisipasi Delegasi DPR RI pada *High Level Political Forum* (HLPF) 2025 di New York ini berdasarkan: Surat Tugas Nomor 16/ku.05.01/KSOI/ST/6/2025 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri *High Level Political Forum* (HLPF) 2025 di New York Amerika Serikat.

D. Susunan Delegasi

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI pada *High Level Political Forum* (HLPF) 2025 di New York, Amerika Serikat antara lain:

Dr. H. Mardani Ali Sera	F. PKS / A.447	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
Bramantyo Suwondo, M.IR.	F. P-Demokrat / A.557	Wakil Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
Rio A. J. Dondokambey, B.Sc.	F. PDIP / A. 251	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
Amelia Anggraini	F. P-Nasdem / A. 394	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
Dr. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A.	F. PKS / A. 442	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
Surya Utama	F. PAN / A. 500	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

E. Misi Delegasi

Misi dari kehadiran Delegasi DPR di kunjungan kerja BKSAP ke *High Level Political Forum* (HLPF) 2025 di New York Amerika Serikat 22 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Membahas Kemajuan dalam Pencapaian SDGs
Delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional akan mempresentasikan laporan kemajuan negara mereka dalam pencapaian SDGs. Ini termasuk tantangan yang dihadapi serta kebijakan yang diterapkan untuk mempercepat implementasi SDGs.
2. Menilai dan Menanggapi Tantangan Global Terkini
HLPF 2025 mungkin akan mencakup diskusi tentang isu-isu global yang sangat relevan, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan krisis lainnya yang berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Delegasi akan bekerja sama untuk merumuskan solusi kolektif.
3. Berkoordinasi dengan Negara Anggota dan Pemangku Kepentingan Lainnya
Delegasi berfungsi untuk memperkuat kerjasama antarnegara, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui forum ini, mereka bisa merundingkan kebijakan bersama atau inisiatif internasional yang mempercepat pencapaian SDGs.
4. Memperkenalkan Inovasi dan Praktik Terbaik
Delegasi akan berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang telah diterapkan di negara mereka untuk memajukan SDGs. Hal ini dapat meliputi kebijakan terkait inklusi sosial, inovasi teknologi, atau sistem pendidikan yang lebih berkelanjutan.
5. Meningkatkan Komitmen terhadap Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan
Salah satu fokus utama HLPF adalah pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Delegasi sering kali akan menekankan pentingnya sumber daya finansial yang lebih besar dan terarah, baik dari sumber domestik maupun internasional, untuk mendukung program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Memperkuat Peran Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil

Delegasi negara juga sering bekerja untuk mendorong sektor swasta dan masyarakat sipil untuk lebih terlibat dalam pencapaian SDGs. Ini dapat termasuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan pihak non-pemerintah untuk menciptakan kolaborasi yang lebih erat.

7. Evaluasi dan Pemantauan SDGs

Sebagai forum tahunan yang berfokus pada evaluasi implementasi SDGs, delegasi juga akan berpartisipasi dalam memperbarui dan memonitor pencapaian indikator-indikator spesifik dalam SDGs dan melaporkan pada forum ini tentang pencapaian, tantangan, dan langkah selanjutnya.

8. Menekan dan Menyusun Aksi Global Terkait Isu Terpenting

Pada HLPF 2025, beberapa isu penting bisa menjadi fokus, seperti pencapaian Agenda 2030 atau implementasi langkah-langkah lebih ambisius dalam mencapai SDGs yang tertinggal. Delegasi akan berusaha memperkuat komitmen global dan menekan negara-negara untuk mengambil tindakan lebih tegas.

F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Delegasi telah melakukan persiapan teknis dan substansi sebelum keberangkatan menuju, New York, Amerika Serikat. Persiapan teknis antara lain registrasi, reservasi kamar, hotel, komunikasi dengan KBRI di New York, pengurusan paspor dan *exit-permit* di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan pengurusan surat perjalanan dinas luar negeri. Pada persiapan substansi dilakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait bahan kerta posisi materi, tenaga ahli menyiapkan usulan-usulan dan kertas posisi dalam bentuk statement untuk General Debate tentang pembahasan indikator-indikator spesifik dalam SDGs, siaran pers atau Press Release, bahan pertemuan dengan banyak pihak terkait di United Nation terutama dengan KBRI di New York.

II. ISI LAPORAN

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat : United Nations Head Quarter, New York, Amerika Serikat

Tanggal : 22 Juli 2025

Waktu : 15:00 – 18:00 waktu setempat

B. Agenda Persidangan

Selasa, 22 Juli 2025	
Waktu	Agenda
15.00	Opening Dr. Tulia Ackson , President of the IPU
15.10 – 16.30	Sesi 1 SDG 5 – The role of parliaments in delivering on gender equality
16.30 – 17.50	Sesi 2 SDG 3 – No one left behind: The role of parliaments in health for all
17.50	Closing Mr. Martin Chungong , Secretary General of the IPU

C. Partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI

1. Opening

Presiden IPU, Dr. Tulia Ackson, menyambut para anggota parlemen dan menyampaikan bahwa sidang dengar pendapat ini memberikan kesempatan penting bagi mereka untuk menyuarakan pendapat mereka di PBB. Kurang dari 20% target TBP berada di jalur yang tepat secara global, dan tidak ada negara yang diprediksi dapat mencapai semua Tujuan tersebut pada tenggat waktu di 2030.

Diperkirakan dibutuhkan dana sebesar US\$ 4 triliun setiap tahun untuk mencapai tujuan tersebut, yang bukan tidak mungkin mengingat ukuran ekonomi global mencapai \$100 triliun. Namun, upaya untuk memenuhi komitmen pemberian bantuan, menemukan solusi berkelanjutan untuk masalah utang yang terus meningkat, menerapkan kebijakan pajak progresif, dan mereformasi sistem keuangan global masih belum memadai. Ia menitikberatkan bahwa semua tindakan yang akan mendorong kemajuan menuju TBP masih belum optimal.

Saat ini sekitar 50 negara terlibat konflik, dan pemerintah membuang-buang waktu, energi, dan triliunan dolar dalam pengeluaran militer alih-alih berinvestasi dalam diplomasi dan dialog, yang lebih murah dan efektif. Ancaman terbesar bagi keamanan nasional adalah ketidakamanan manusia, yang memicu keresahan sosial dan ketegangan politik.

Meskipun terdapat kemajuan di beberapa bidang, Tujuan 3 dan 5 masih jauh dari jalur yang diharapkan, meskipun keduanya vital bagi pencapaian semua TBP. IPU memiliki sumber daya untuk membantu parlemen, termasuk perangkat pengawasan legislatif berbasis TBP. Meskipun Tinjauan Nasional Sukarela atau *Voluntary National Review* (VNR) nasional sangat penting, survei menunjukkan bahwa hanya sepertiga parlemen yang berkontribusi pada laporan kemajuan TBP tahunan ini. Para anggota parlemen didesak untuk bertindak cepat dalam TBP: dengan hanya lima tahun tersisa, setiap hari adalah kesempatan untuk membuat perubahan.

2. Sesi 1: SDG 5 – The role of parliaments in delivering on gender equality

Pada sesi pertama Parliamentary Forum in HLPF 2025 mengangkat tema terkait pencapaian TBP terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sebagai moderator adalah Ms. Paddy Torsney, Kepala IPU Permanent Observer to the UN in New York; narasumber pada sesi panel pertama antara lain Ms. Gabriela Morawska-Stanecka, Wakil Presiden IPU dan sekaligus Anggota Senat Polandia, Mr. Mohamed Sabbari, Wakil Ketua of the Dewan Perwakilan Morocco, Ms. Fatuma Dullo, Anggota Senat Kenya, dan Ms. Julie Ballington, Penasehat Politik untuk *Political Participation, Leadership and Governance Section*, UN Women.



Gambar 1.0 Delegasi BKSAP DPR RI dalam Pertemuan *High Level Political Forum (HLPF)* 2025 di New York, Amerika Serikat

Di sesi ini dipaparkan terkait pentingnya keterwakilan perempuan bagi perdamaian dan keamanan, ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kesetaraan gender dalam jumlah dan pengaruh merupakan kunci bagi perempuan untuk berhasil mengubah agenda parlemen – dan, yang terpenting, hasil kebijakan akan meningkat dengan pengambilan keputusan yang inklusif. Namun, perempuan masih sangat kurang terwakili karena budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat dan lembaga negara – parlemen, pemerintahan, dan secara menyeluruh. Kemajuan selama 30 tahun terakhir, meskipun nyata dan penting, masih terlalu lambat, rapuh, dan tidak konsisten.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa sekitar seratus negara tidak memiliki jaminan untuk partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan dalam politik terus menghadapi hambatan gender termasuk stereotip yang mengakar kuat, pelecehan seksual, ancaman, dan kekerasan – baik daring maupun luring. Laki-laki mendominasi pengambilan keputusan: data dari IPU dan UN Women menunjukkan bahwa hanya 28 negara yang dipimpin oleh perempuan dan 102 negara tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Perempuan hanya menempati 23% menteri kabinet, dan sembilan negara tidak memiliki perempuan di kabinet. Meskipun kerangka kerja saat ini menyerukan kesetaraan gender 50-50 dalam politik, rata-rata global sebesar 27% perempuan masih jauh dari target 30% yang ditetapkan 35 tahun lalu.

Dibahas juga mengenai kuota pemilu yang merupakan pendorong utama kesetaraan gender, tetapi masih kurang dimanfaatkan. Menurut UN Women, 93 negara telah mengesahkan kuota pemilu di tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 73 negara telah mengadopsi kuota dalam undang-undang pemilu, 25 negara dalam undang-undang paritas, dan 17 negara dalam konstitusi mereka. Namun, hanya 37% dari negara-negara ini yang telah menetapkan target lebih dari 40% untuk partisipasi perempuan. Untuk meningkatkan efektivitas kuota, anggota parlemen harus menetapkan target yang tegas, memberlakukan aturan pemeringkatan dan penggantian yang memberi perempuan kesempatan untuk mencalonkan diri memperebutkan kursi yang dapat dimenangkan, dan menggunakan mekanisme penegakan hukum seperti tidak mendaftarkan diri dan sanksi finansial bagi partai politik yang gagal mematuhi.

Dalam forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat diimplementasikan di parlemen dan lembaga negara masing-masing. Adapun rekomendasi yang disepakati, antara lain:

- a. Mengamankan hak-hak perempuan dalam konstitusi dan kerangka legislatif, dan mengadopsi rencana aksi nasional dan menggunakan fungsi parlemen terkait anggaran dan pengawasan yang responsif gender untuk mendanai dan memastikannya.

- b. Memperkuat kerangka normatif, hukum, dan peraturan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk dengan mengadopsi kuota electoral yang bersifat wajib.
- c. Mempromosikan kesetaraan gender di semua tingkatan dan di semua bidang pengaruh, termasuk di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dan di panggung nasional maupun internasional.
- d. Mengajarkan kepada anak perempuan dan laki-laki, serta kaum muda, tentang kesetaraan, nilai-nilai egaliter, dan pentingnya mempromosikan peran
- e. perempuan dan anak perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
- f. Memastikan partisipasi publik menjadi inti dari proses legislasi.
- g. Membentuk komite gender parlemen dan kaukus perempuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mendukung pemberdayaan perempuan di parlemen.
- h. Menangani kebutuhan perempuan dan anak perempuan dengan program dan layanan yang terarah.
- i. Meninjau kebijakan dan anggaran seputar pengasuhan dan membangun solidaritas dengan rekan kerja pria yang mendukung upaya kesetaraan gender.
- j. Berani untuk bersuara dan menunjukkan solidaritas internasional ketika diskriminasi, kekerasan, dan pembungkaman perempuan terjadi.

Sesi Intervensi:

Pada sesi ini, DPR RI melalui Ibu Amelia Anggraini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong percepatan pencapaian SDG 5 tentang kesetaraan gender. Disampaikan bahwa meskipun jumlah perempuan hampir setara dengan laki-laki di tingkat global (49,6%), representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah. Indonesia sendiri telah mencatat peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, dari 9% anggota DPR perempuan pada 1999 menjadi 22% pada 2024. Namun, angka ini masih di bawah target 30% yang menjadi standar kesetaraan gender. Untuk itu,

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif, antara lain kuota pencalonan 30% bagi perempuan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sistem zipper, dan kini sedang mengupayakan penerapan sistem penempatan 2:1 untuk meningkatkan keterpilihan perempuan.



Gambar 1.1 Fokus Pertemuan dalam Pertemuan *High Level Political Forum (HLPF)* 2025 di New York, Amerika Serikat

Selain itu, dibentuk pula Kaukus Perempuan Parlemen lintas partai dan mekanisme regulasi yang menjamin inklusi perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Di sisi lain, DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan melalui platform digital perencanaan dan penganggaran nasional **KRISNA**, yang telah mengintegrasikan dan menandai *gender-responsive budgeting* (GRB) di berbagai kementerian.

Delegasi Indonesia menekankan bahwa keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada angka, melainkan harus diwujudkan dalam partisipasi bermakna dan praktik yang sensitif gender dalam semua fungsi parlemen. Kolaborasi lintas sektor juga dipandang penting untuk memastikan penerapan prinsip nol

toleransi terhadap seksisme, pelecehan, dan diskriminasi, baik di parlemen, lembaga pemerintah, sektor swasta, maupun komunitas lokal. Indonesia percaya bahwa pencapaian SDG 5 akan memberikan manfaat besar tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Sesi 2: “SDG 6: an illustration of parliamentary action”

Pada sesi ke-2 ini menghadirkan Ms. Farida Ilimi, Anggota Majelis Rakyat Aljazair, sebagai moderator, dan narasumber sesi ini antara lain Ms. Petra Bayr, Anggota Parlemen Austria; Mr. John Banza Lunda, Anggota Parlemen Democratic Republic of Congo; Ms. Soyoltuya Bayaraa, Wakil Direktur UNFPA. Dalam sesi ini dijelaskan terkait dengan SDG 3 berfokus pada memastikan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua, dengan prioritas di bidang-bidang seperti cakupan kesehatan universal, serta kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir, anak, dan remaja. Meskipun beberapa tahun terakhir telah menunjukkan penurunan angka kematian anak dan pengobatan HIV yang lebih baik, kemajuan di bidang-bidang seperti kematian ibu dan akses ke layanan kesehatan masih minim.

Pada tahun 2019, para pemimpin dunia mengadopsi Deklarasi Politik Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Cakupan Kesehatan Universal. Pada tahun yang sama, parlemen dari seluruh dunia mengadopsi resolusi IPU, "Mencapai Cakupan Kesehatan Universal pada Tahun 2030: Peran Parlemen dalam Menjamin Hak atas Kesehatan". Kedua resolusi tersebut menunjukkan pentingnya mencapai kesehatan untuk semua. Namun, pada tahun 2021, 4,5 miliar orang tidak memiliki akses penuh ke layanan kesehatan esensial.

Dijelaskan bahwa ketimpangan kesehatan masih terjadi, dan perempuan dan anak perempuan menghadapi hambatan sistemik, serta serangan yang semakin meningkat, terhadap kesehatan dan hak seksual dan reproduksi mereka, yang fundamental bagi martabat manusia, pemberdayaan, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Setiap US\$ 1 yang diinvestasikan dalam keluarga berencana dan kesehatan ibu menghasilkan lebih dari US\$ 8

manfaat ekonomi. Namun, informasi tentang, dan layanan untuk, kesehatan seksual dan reproduksi secara konsisten dipolitisasi dan kekurangan dana dalam kebijakan, strategi, dan rencana jaminan kesehatan universal. Diskriminasi dan stereotip yang merugikan menghalangi akses ke layanan esensial, dan hambatan dilembagakan dalam norma, hukum, dan kebijakan. Perempuan dan anak perempuan menderita dan meninggal ketika perawatan medis ditolak karena kebijakan dan norma yang membatasi. Dan setiap dua menit, seorang perempuan meninggal karena penyebab yang dapat dicegah terkait kehamilan dan persalinan.

Area perhatian utama lainnya yang diangkat meliputi berkurangnya bantuan, skeptisisme kesehatan masyarakat yang mengakar, keraguan terhadap vaksin, meningkatnya isolasionisme, dan serangan terhadap kesehatan perempuan, yang semuanya telah menciptakan hambatan bagi pencapaian kehidupan sehat untuk semua.

Ada juga kebutuhan untuk perawatan yang lebih kompleks dan jangka panjang bagi masyarakat yang menua, lebih banyak layanan kesehatan mental dan pencegahan, dan akses yang lebih besar ke layanan kesehatan bagi penduduk pedesaan dan populasi rentan lainnya – yang semuanya membutuhkan tindakan yang terarah.

Adapun hasil rekomendasi kebijakan dari sesi ini, antara lain:

- a. Memperkuat tenaga kesehatan dengan memastikan ketersediaan bidan dan tenaga medis yang memadai untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi.
- b. Mengintegrasikan kesehatan reproduksi dalam cakupan kesehatan universal serta pastikan perlindungan finansial agar layanan esensial dapat diakses semua lapisan masyarakat.
- c. Menggunakan data komprehensif dan berbasis sains untuk menutup kesenjangan layanan dan memastikan kebijakan kesehatan yang adil dan efektif.

- d. Memprioritaskan pencegahan dan pemberdayaan perempuan, serta dorong kebijakan lintas sektor seperti pendidikan dan iklim yang mendukung kesehatan masyarakat.
- e. Memperkuat kerja sama internasional dengan mendukung organisasi multilateral (UNFPA, UN Women, WHO) guna menghadapi isu lintas batas seperti kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia.
- f. Membiasakan diskusi terkait kesehatan reproduksi melalui pendidikan, kampanye kesadaran, kebijakan, dan layanan yang inklusif.
- g. Memfokuskan pada populasi rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan dengan memperluas layanan kesehatan berbasis komunitas dan perawatan jangka panjang.

Sesi Intervensi:

Dalam forum ini, delegasi DPR RI yang diwakili oleh Bapak Surya Utama, menekankan bahwa kesehatan bukanlah sebuah privilese, melainkan hak dasar setiap individu. Parlemen memiliki peran strategis karena berada dekat dengan masyarakat akar rumput sekaligus memiliki kewenangan untuk merancang kerangka legislasi, mengalokasikan anggaran yang adil, serta mengawasi pelaksanaan respons kesehatan, termasuk dalam situasi darurat. Konstitusi Indonesia menjamin hak kesehatan bagi seluruh warga negara, yang diperkuat oleh sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang menekankan layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Sebagai bentuk komitmen untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, Pemerintah Indonesia meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014, yang pada tahun 2024 telah mencakup 98% populasi atau lebih dari 220 juta jiwa. DPR RI juga aktif dalam menekan angka kematian ibu, menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi berbasis sekolah dan komunitas, serta

mengawasi distribusi anggaran untuk layanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi. Parlemen mendorong diskusi inklusif melalui rapat dengar pendapat dengan kementerian kesehatan maupun organisasi masyarakat sipil.

Delegasi Indonesia menegaskan bahwa isu kesehatan bersifat kompleks dan membutuhkan strategi multisektor serta kerja sama lintas pemangku kepentingan. Program pengendalian dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs) menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian, termasuk kesehatan, lingkungan, dan penanggulangan bencana. Indonesia menyerukan kepada parlemen dunia untuk bersama-sama memperkuat sistem kesehatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan demi memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

4. *Voluntary National Report* ke-4 Indonesia pada HLPF 2025

Di sela-sela Forum HLPF 2025, Ketua Delegasi DPR RI, Bapak Mardani Ali Sera mendampingi Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Bapak Febrian A. Ruddyard saat menyampaikan *Voluntary National Review* (VNR) keempat Indonesia.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyampaianannya menekankan bahwa keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menuntut adanya perencanaan yang komprehensif, tanggung jawab kolektif, serta konsistensi dalam pelaksanaan, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 61% dari 233 indikator SDGs Indonesia telah berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target tahun 2030, melampaui capaian rata-rata global. Untuk memastikan keberlanjutan capaian tersebut, Pemerintah Indonesia mengedepankan empat strategi utama, yaitu: (1) mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional; (2) memperkuat kepemilikan dan kepemimpinan di tingkat daerah; (3) meningkatkan kualitas data sebagai dasar

pengambilan keputusan yang lebih efektif; serta (4) menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud komitmen kepemimpinan.

Selanjutnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bapak Mardani Ali Sera, menegaskan peran sentral parlemen dalam mendukung pencapaian SDGs. DPR RI berperan aktif dalam proses penyusunan Voluntary National Review (VNR) serta mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna memastikan konsistensi kebijakan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu, DPR RI telah membentuk Kelompok Kerja khusus SDGs sebagai instrumen kelembagaan, serta secara konsisten mendorong pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan (*whole-of-society approach*) untuk memperkuat efektivitas implementasi SDGs di Indonesia.



Gambar 1.2 Pertemuan ini menggarisbawahi terjalannya hubungan baik antara anggota parlemen, pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya tujuan Pembangunan

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keseluruhan acara *Parliamentary Forum at the High-Level Political Forum on Sustainable Development 2025* di New York – Amerika Serikat berjalan lancar dan sukses.
2. Anggota DPR RI mendapatkan wawasan dan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan terkait dengan peran parlemen dalam mempercepat pencapaian SDGs (Goal 3 dan 5) di Indonesia.
3. Partisipasi DPR RI juga dilaksanakan dalam diskusi panel ini dapat menjadi rujukan bagi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi, dan Badan terkait.
4. Forum ini juga mendukung terjalinnya hubungan baik antara anggota parlemen, pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya tujuan Pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global.

B. Saran

1. Hasil *Parliamentary Forum at the High-Level Political Forum on Sustainable Development 2025* ini memerlukan implementasi dari parlemen masing-masing negara. Oleh karena ini, rekomendasi dari konferensi ini perlu disampaikan kepada Komisi-Komisi terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti.
2. Percepatan pencapaian TBP dari sisi parlemen dapat dilakukan melalui penguatan regulasi nasional agar sejalan dengan tenggat waktu pencapaian TBP 2030. Hal ini bisa dijalankan melalui koordinasi dan peningkatan kapasitas yang melibatkan Badan dan Komisi terkait di DPR RI, Kementerian dan Lembaga terkait.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada *High Level Political Forum* (HLPF) 2025 di New York, Amerika Serikat ini menggunakan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) APBN 001030.CF.5805.AEC.001.051.C.524211 dari anggaran perjalanan dinas luar negeri yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.391.818.500,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

B. Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi

Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Inter-Parliamentary Union (IPU) dan United Nations sebagai penyelenggara, Bappenas sebagai mitra DPR RI dalam pencapaian TPB secara nasional dan pelaporan VNR Indonesia.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada PTRI New York yang telah berkenan untuk memberikan pendamping delegasi DPR RI sehingga acara *Parliamentary Forum at HLPF 2025* berjalan lancar dan sukses.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat dan Tenaga Ahli BKSAP DPR RI yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan acara *Parliamentary Forum at HLPF 2025* ini.

C. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- [Foto dan Video kegiatan](#) :
- Invitation Parliamentary Forum at the 2025 HLPF
- Agenda Kegiatan
- Link berita di Media Sosial : [BKSAP DPR hadiri Parliamentary Forum at UNHLPF on SDGs](#)

D. Kata Penutup

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pustaka sejarah partisipasi DPR RI dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam forum-forum antar parlemen. Laporan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keikutsertaan DPR RI dalam forum-forum antar parlemen lainnya di masa mendatang.

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi DPR RI atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 25 Juli 2025

Ketua Delegasi

Dr. Mardani Ali Sera



LAMPIRAN

PARLIAMENTARY FORUM AT THE HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT



Inter-Parliamentary Union

For democracy. For everyone.

Office of the Secretary General

T +41 22 919 41 50

F +41 22 919 41 60

E postbox@ipu.org

www.ipu.org

Chemin du Pommier 5

Case postale 330

1218 Le Grand-Saconnex

Geneva – Switzerland

Geneva, 13 May 2025

Parliamentary Forum at the 2025 HLPF

Dear Madam President,
Dear Mr. President,

I am pleased to inform you that this year's **Parliamentary Forum** at the UN's [High Level Political Forum on sustainable development](#) (HLPF) will take place in the afternoon of **Tuesday, 22 July**, in New York.

The annual HLPF at the UN offers a unique opportunity to review progress toward the SDGs together with ministers, experts and civil society representatives. With the SDGs off track, strong parliamentary action is needed to hold governments accountable for their SDGs commitment and to institutionalize the SDGs through all relevant policies and processes.

Entitled ***Gender equality and health: fast forwarding progress***, the Parliamentary Forum will focus on two Sustainable Development Goals (SDGs) that are under review at the 2025 HLPF, namely, SDG 3, on health and wellbeing for all, and SDG 5, on gender equality and empowerment of women and girls. In two fast-paced sessions, the meeting will highlight the concrete steps parliaments can make to advance these goals and help reset the SDGs as a whole.

The draft programme of the Parliamentary Forum will be posted to the [event's page](#) on the IPU website in the coming weeks. Interested participants are invited to register via the [online form](#) available at that page.

As per past practice, the Parliamentary Forum is open to members of parliament attending the HLPF session as part of their national delegations. Interested parliamentarians should contact their Foreign Ministry or their Mission in New York to enquire about accreditation and other practical arrangements.

Should you require further information, my colleagues at the New York Office (ny-office@ipu.org) are available to assist.

Yours sincerely,

Martin Chungong
Secretary General



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Parliamentary Forum at the 2025 UN High Level Political Forum on Sustainable Development

Gender equality and health: fast forwarding progress

Tuesday, 22 July, 15:00–18:00
Conference Room 3
United Nations, New York

The Parliamentary Forum at the UN's High Level Political Forum (HLPF) is designed to engage parliamentarians in assessing progress toward the Sustainable Development Goals (SDGs) at the global level. Billed as a Special Event of the annual HLPF session, the Parliamentary Forum provides a major opportunity for parliamentary oversight of government action as well as for an exchange of best legislative practices on sustainable development from parliaments around the world.

This year's Parliamentary Forum will focus on two SDGs that are under review at the HLPF, namely, SDG 3, on health and human well-being, and SDG 5, on gender equality and the empowerment of women and girls. In two fast-paced sessions, the meeting will highlight the concrete steps parliaments can take to advance these goals and help reset the entire SDGs framework.

Draft programme

15:00 Opening

Dr. Tulia Ackson, President of the IPU

15:10 SDG 5 – The role of parliaments in delivering on gender equality

SDG 5 is a key enabler for achieving the entire sustainable development agenda. Gender gaps in education, health and income stem from women's and girls' unequal status, voice and power, be it in law or in practice, in the household or in politics. This discrimination fuels gender-based violence against women and girls, including harmful practices such as child marriage and female genital mutilation, all of which further hamper the well-being and empowerment of women and girls, and undermines the achievement of the SDGs for all.

In a context of pushback on women's rights, parliaments must stand strong and be institutions that are fully inclusive of women in all their diversity, in parity with men, and able to advance gender equality in line with SDG 5. However, on 1 January 2025, women occupied only 27.2% of seats in national parliaments globally. This is a gain of a mere 0.3 percentage points since January 2024 and is a slowdown compared to an average annual increase of nearly 0.5 percentage points in the previous decade. The representation of young women is particularly low: globally, only 1.4% of MPs are women

under the age of 30 and only 7.9% are women under 40. With this, the pushback on women's rights and empowerment is also felt at the level of women's participation in parliament.

Electoral quotas remain a determining factor for progress towards gender parity in decision-making. Countries that applied quotas in 2024 elected far more women MPs (31.2%) than those without quotas (16.8 %). For quotas to work they must be ambitious, duly enforced and combined with measures to create a conducive environment. Addressing the obstacle that violence against women in politics constitutes is another determining factor for progress.

General recommendation No. 40 (GR 40) adopted by the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) in October 2024 provides game changing guidance towards achieving equal and inclusive representation of women in decision-making.

Echoing GR 40, the Plan of Action adopted at the 2025 IPU Global Conference of Women Parliamentarians in Mexico, called for:

- Parity in numbers – a 50:50 balance between women and men in parliament, across all age groups and in line with other categories of diversity.
- Parity in influence and power – ensuring that women and men have the same levels of leadership and influence in parliament.
- A parity culture – namely, safe and inclusive working conditions, gender-sensitive parliaments and zero-tolerance for sexism, harassment and violence, both offline and online.

Participants at the Parliamentary Forum will be invited to share insights on achievements made and the way forward towards ensuring parliaments achieve gender parity in numbers, influence and power, and are genuinely gender-responsive institutions.

The session will address the following guiding questions:

- How close is your Parliament to achieving parity in numbers among men and women?
- Does your Parliament currently apply measures to promote parity in influence and power? If yes, which measures?
- What works to have more women from marginalized groups in parliament?
- Are members of parliament leading gender-responsive laws, policies and budgets? What are the challenges on that front and how can inter-parliamentary cooperation be helpful?
- Is zero-tolerance towards sexism, harassment and violence applied in your Parliament? What is needed to advance towards parliaments free from violence against women members and staff?

16:30 SDG 3 – No one left behind: The role of parliaments in health for all

SDG 3 seeks to “ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”. This includes critical health priorities such as universal health coverage (UHC), reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health, and the reduction of disease burdens.

Global progress has been achieved in several areas, with most countries being on track to meet the under-5 mortality target, and effective HIV treatment cutting global AIDS-related deaths by 52% since 2010. However, minimal advances have been made after 2015 in critical areas such as the reduction of maternal mortality and access to health services. One woman dies every two minutes from preventable causes related to pregnancy and childbirth, while in 2021 about 4.5 billion people were not fully covered by essential health services. Stark health inequities also persist undermining progress on SDG 3 and the broader 2030 Agenda for Sustainable Development.

Health inequity remains a pressing challenge across all regions, driven by factors including discrimination, harmful social and cultural norms, structural barriers, and entrenched gender inequality. Women and girls in particular, continue to face systemic obstacles that limit their ability to make autonomous health decisions. Financial dependence, social expectations, and gender biases in healthcare provision contribute to poor access and substandard care. Meanwhile, individuals in marginalized situations frequently encounter stigma and exclusion both within healthcare systems and society at large.

In some contexts, legal and policy frameworks further entrench disparities. The categorization of people as “vulnerable and marginalized groups” often obscures the historical, political, and structural factors that have produced these inequities. This can diminish accountability and limit the scope of policy solutions. Moreover, effective promotion of the needs and rights of some groups may sideline other marginalized populations, especially when political sensitivities deter open advocacy for less “visible” or politicized communities.

These challenges are compounded by increasing polarization and a growing pushback on sexual and reproductive health and rights (SRHR) and broader gender equality efforts – threatening hard-won gains in human rights and inclusive health policies.

This session will provide a space for parliamentarians to engage in a constructive exchange on the importance of health equity as a foundational principle of SDG 3 and the SDGs more broadly. It aims to explore the role of parliaments in addressing structural barriers, safeguarding rights and ensuring inclusive health systems that leave no one behind.

The session will address the following guiding questions

- What are some examples of effective parliamentary action that promote health and protect rights, especially of populations in vulnerable and marginalized situations?
- How can parliaments serve as inclusive spaces for dialogue and accountability on equitable health access?
- How can parliaments best overcome and combat discrimination and stereotypes that lead to women’s and girls’ exclusion from essential health services, especially in the area of sexual and reproductive health and rights?
- How can parliaments help ensure that policies in other areas such as education, food and climate also support people’s health, especially that of the most vulnerable?

17:50 Closing

Mr. Martin Chungong, Secretary General of the IPU